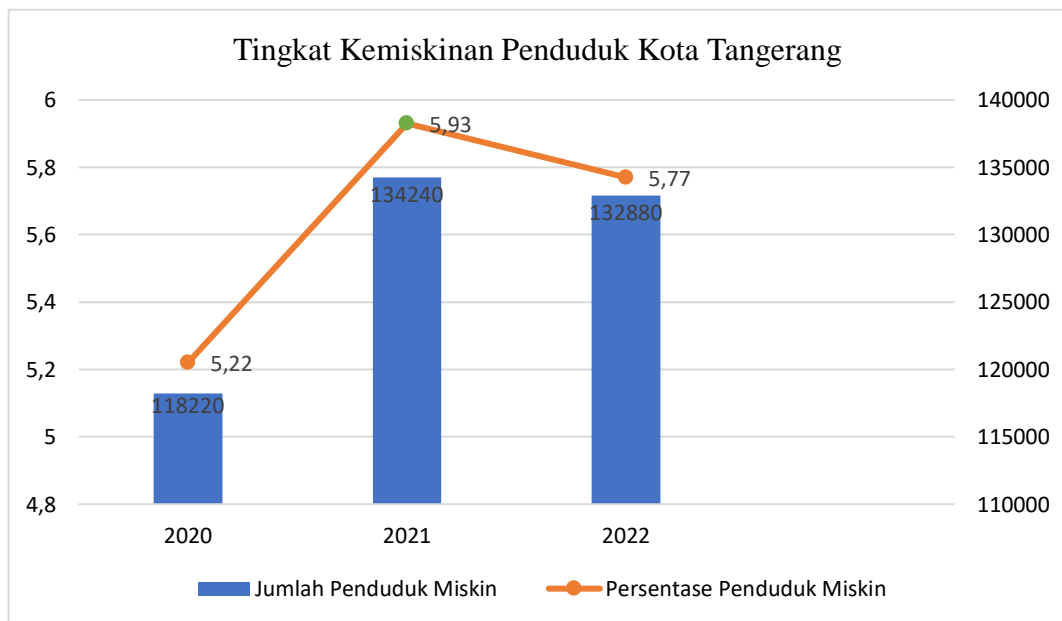


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan pada hakikatnya terjadi karena adanya ketimpangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas disatu pihak dan adanya keterbatasan-keterbatasan pada pihak lain, baik yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya sendiri. Kemiskinan adalah keadaan yang berada pada garis standar kemiskinan karena kurangnya pendapatan yang dimiliki untuk memenuhi akan kebutuhan dasar hidupnya. Menurut Sukma (2020) menyatakan bahwa individu atau kelompok dikatakan miskin apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan sehingga kehidupannya dikatakan tidak sejahtera. Sejahtera adalah situasi dimana individu yang dapat atau mampu memenuhi akan kebutuhan – kebutuhan selain kebutuhan dasar hidup.



**Gambar 1.1**

Grafik Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kota Tangerang  
Tahun 2020 – 2022

**Sumber : BPS Kota Tangerang 2022**

Demikian grafik 1.1 menggambarkan perkembangan baik jumlah dan presentase penduduk miskin Kota Tangerang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami perkembangan baik jumlah dan presentase penduduk miskin. Hal ini mengalami naik dan turun jumlah dan persentase merupakan sebuah peringatan untuk pemerintah agar memperhatikan dengan serius dalam penanggulangan kemiskinan dalam memuntus rantai kemiskinan dengan baik di Kota Tangerang (BPS Kota Tangerang 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Tangerang untuk dapat terus mengurangi jumlah penduduk miskin menjadikan mereka dari tidak berdaya menjadi berdaya mensejahterakan kehidupannya.

Upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang dengan berbagai cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan memberikan peluang kepada masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun, pemerintah sudah berupaya dalam menaggulangi kemiskinan akan tetapi pemerintah masih belum berjalan dengan baik untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang ada dengan kebijakan – kebijakan yang telah dibuatnya. Tentu saja hal ini pemerintah dari tahun ke tahun harus melakukan penanggulangan kemiskinan menjadi lebih baik dengan melakukan pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Dalam pengembangan kebijakan tentu dibutuhkan tidak hanya perencanaan program dari kebijakan itu sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaan program tersebut pada kebijakan yang diterapkan untuk dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan awal. Maka dari itu kebijakan yang dibuat untuk upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan adanya komitmen yang tinggi keberpihakan pada mereka penerima manfaat. Komitmen yang dilakukan oleh pemerintah akan terlihat pada perilaku pemerintah itu sendiri. Perilaku pemerintah yang bersih dari korupsi menjadikan salah satu bentuk cermin untuk melihat sejauh mana komitmen pemerintah dalam kebijakan yang diselenggarakan. Sehingga dalam penanggulangan kemiskinan perlu adanya komitmen pemerintah dan komitmen penerima manfaat demi terlaksanya sebuah kebijakan yang melahirkan program yang baik dalam

keberlangsungan implementasi dari kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Tangerang adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengeluarkan program khusus dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada sejak tahun 2007 telah dilaksanakan pemerintah Indonesia bentuk bantuan sosial bersyarat sebagai perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) guna dapat mensejahterahkan masyarakat miskin dan berhasil menurunkan angka kemiskinan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan adanya program PKH tentu memiliki tujuan dalam meningkatkan kualitas hidup yang fokusnya kepada masyarakat miskin, tentu saja masyarakat yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna memperoleh bantuan berupa dana untuk membantu kehidupan mereka agar berdaya keluar dari angka garis kemiskinan dengan pengelolaan dana yang telah diberikan pemerintah. Selain itu keberadaan bantuan sosial PKH pada saat pandemi covid-19 sangat membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk tetap bertahan hidup agar tetap mejadi berdaya dalam kesejahteraan.

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) menurut payung hukum Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tujuan diatas merupakan program yang diberikan kepada keluarga miskin bersyarat dengan memberikan bantuan sosial yang masuk daftar dalam

data program penanganan fakir miskin, yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN KESOS) selain itu juga dipastikan sebagai Keluarga Penerima PKH. Sedangkan tujuan untuk jangka panjang PKH diharapkan dapat memotong rantai kemiskinan meningkatkan sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan menjadi memiliki kekuatan, oleh karena itu diperlukan penguatan atau pemberdayaan agar penerima bantuan tersebut dapat berdaya untuk keluar dari lingkaran kemiskinannya. PKH merupakan program perlindungan sosial terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) oleh itu anggota keluarga yang telah melakukan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Komponen PKH memfokuskan kepada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk keluarga sangat miskin (Kementerian Sosial,2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, penerima manfaat dari program keluarga harapan yaitu untuk ibu hamil/menyusui, anak usia dibawah 6 tahun, anak yang bersekolah, orang tua lanjut usia (60 tahun ke atas), dan penyandang disabilitas berat. Dalam hal ini harus selaras antara tujuan dari adanya PKH dengan komponen kepesertaan penerima bantuan sosial, agar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan untuk mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan sumber daya manusia agar keluar dari ketidak berdayaan.

Kecamatan Cipondoh adalah salah satu kecamatan yang terletak di bagian utara Kota Tangerang dengan luas wilayah tercatat sebesar 1.938,1 Ha. Kecamatan Cipondoh terbagi atas 10 kelurahan salah satunya kelurahan Kenanga dengan jumlah penduduk sebanyak 19.810 (BPS Kota Tangerang, 2021). Mengingat terjadinya peningkatan arus urbanisasi yang terjadi dikelurahan Kenanga maka dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk dari tahun hingga tahun berikutnya. Hal ini menyebabkan potensi peningkatan angka kemiskinan serta permasalahan kesejahteraan sosial lainnya. Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan terdapat permasalahan pada ketika mengikuti verifikasi dan validasi data memalui program pejuang muda, peneliti melihat banyak sekali masyarakat yang layak menerima bantuan PKH namun tidak

tercatat data didalam DTKS. Selain itu masih banyak ditemukan KPM yang tidak mengetahui tujuan dari PKH itu sendiri, sehingga menjadikan mereka sebagai penerima manfaat yang bergantung akan bantuan tersebut.

Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kelurahan Kenanga sebagai berikut :

**Tabel 1. 1**

Jumlah KPM PKH di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah KPM PKH</b>
2020	378
2021	368
2022	401
2023 (Tahap 1)	373

**Sumber :** *Data olah dari Pendamping PKH Kelurahan Kenanga*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 401 KPM dan tahun 2023 pada tahap 1 sebesar 373 KPM dalam proses termin pertama penyelesaian PKH, sementara masih ada 3 tahap lagi yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Pelaksanaan PKH di Kelurahan Kenanga tentu saja tidak berjalan lurus begitu saja, banyak sekali permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Wawancara pendamping PKH, 14 Juni 2023). Tidak menutup kemungkinan juga terjadinya penyimpangan yang telah ditetapkan pada peraturan yang ada dalam pelaksanaannya dalam PKH untuk penanggulangan kemiskinan pada masyarakat miskin. Tentu saja dalam pelaksanaan program yang dibuat pemerintah harus dilakukan secara transparansi dalam perencanaan hingga pelaksanaan program tersebut. Banyak ditemukan KPM yang tidak menerima bantuan hanya terdaftar namanya saja, selain itu terdapat data yang tidak sesuai dengan kriteria dalam artian banyak tidak sesuai sasaran

penerimaan. Oleh karena itu perlunya adanya pemahaman kepada pelaksana PKH baik pendamping dan penerima manfaat dari bantuan tersebut mengenai pelaksanaan PKH.

Melihat banyak permasalahan - permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH dilapangan tentu diperlukan pendamping PKH agar masyarakat miskin sebagai penerima manfaat memahami betul akan tujuan dengan pemberian bantuan melalui PKH yang bersifat tunai atau *Conditional Cash Transfers* (CTT) bersyarat. Dengan adanya pelaksana dari PKH atau pendamping sosial PKH sebagai penghubung untuk KPM untuk dapat memahami tujuan dari pemberian bantuan PKH. Selain itu adanya pendamping PKH sebagai pelaksana dapat melakukan pengusulan dalam pembaruan data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sesuai dengan kriteria penerima manfaat. Pelaksana PKH atau pendamping dalam keberlangsungan pelaksanaannya sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan observasi awal peneliti permasalahan yang banyak ditemukan ialah KPM kurang pemahaman akan tujuan pemberian bantuan dan mengenai kewajiban dari penerima PKH, selain itu masih terjadi pendataan yang tidak sesuai atau sering disebut tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan komponen yang ada. Oleh karena itu pelaksana dari PKH di kelurahan Kenanga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan proses pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, selain pelaksana harus komitmen agar konsisten diperlukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi terhadap masalah yang terjadi dengan mengambil judul ***“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang.”***

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan latarbelakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan di Kota Tangerang mengalami pengembangan baik naik dan turun tiap tahunnya berdasarkan jumlah dan presentase penduduk miskin secara absolut.
2. Pemerintah mengeluarkan kebijakan perlindungan sosial pada masyarakat miskin guna mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersifat bantuan bersyarat.
3. Pada proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang sebagai bentuk upaya penanggulangan kemiskinan bahwa perlu adanya pelaksana program atau pendamping untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mengelolah pemanfaatan yang sesuai komponen kepemilikan.
4. Terdapat peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang pada tahun 2022 hingga tahap 1 tahun 2023.
5. Di kelurahan Kenanga Kota Tangerang terdapat kurang pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tujuan pemberian bantuan dan mengenai kewajiban sebagai penerima PKH.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan luasnya pembahasan pada latarbelakang penelitian diatas, peneliti mempertimbangkan maka peneliti melakukan pembatasan masalah bertujuan penelitian agar terfokus dalam melakukan penelitian dan mengingat keterbatasan waktu penelitian. Oleh karena itu peneliti melakukan pembatasan masalah demi terfokusnya penelitian yaitu mekanisme atau alur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta kendala pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahapan

pertemuan awal dan validasi data, selain itu pada tahapan verifikasi komitmen di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang untuk memudahkan alur penelitian sehingga penelitian ini dapat terarah sesuai yang sudah ditetapkan peneliti.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dengan banyak permasalahan yang terjadi pada masyarakat terkhusus pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berbasis keluarga untuk memenuhi kebutuhan keberfungsian sosial. Maka dari itu peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas ialah :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang ?
2. Apa saja kendala pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahapan pertemuan awal dan validasi data serta tahapan verifikasi komitmen di Kelurahan Kenanga KotaTangerang ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas ialah :

1. Mendeskripsikan sejauh mana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang.
2. Mendeskripsikan kendala pelaksanaan PKH Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahapan pertemuan awal dan validasi data serta tahapan verifikasi komitmen di Kelurahan Kenanga KotaTangerang.



## **1.6 Manfaat Penelitian**

Setelah tujuan penelitian tentu adanya manfaat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah :

a. Secara teoritis

Dalam hal ini hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat untuk tingkat pemahaman pada ilmu pengetahuan terutama dibidang kesejahteraan sosial, perlindungan sosial. Sekaligus sebagai bahan literatur terkait pentingnya pelaksanaan sebuah program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Secara Praktis

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah mengenai gambaran sejauh mana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebagai bahan pengetahuan kendala dalam pelaksanaan proses Verifikasi dan Validasi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima PKH untuk penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Kenanga. Dapat mengetahui peranan pendamping PKH berjalan baik atau tidak dalam pelaksanaannya di Kelurahan Kenanga. Selain itu dapat mengetahui dukungan yang diberikan pemerintah pada pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di kelurahan Kenanga Kota Tangerang.